

PERKEMBANGAN SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA

Sudarto, M,Pd.I
(Dosen Tetap STIT)

ABSTRACT

Islamic school (Madrasah) in Indonesia have a very old history of Indonesian age. At the beginning of Islam's entry into Indonesia, the preachers made contact with the community. After the Islamic community was formed the local community began to build mosques. There are also in some areas that use pre-existing places as places of worship. The place of worship is then developed into Islamic education which later developed into a Islamic School (Madrasah).

To find out further of Islamic School (madrasah) developments, the authors summarize Islamic School (Madrasah) books: History and Development. To complete the deficiencies in the book the author takes additional material from the book History of Growth and Renewal of Islamic Education in Indonesia and History of Islamic Education book: Tracing the Trace of Education Rasulullah Era to Indonesia.

A. Konsep Madrasah

Konsep lembaga pendidikan Islam di Indonesia berkembang secara dinamis sepanjang sejarah. Sebagai lembaga keagamaan yang memiliki akar sejarah yang panjang, fokus transformasi madrasah terletak pada kepentingannya untuk menjaga karakter keislaman dan mengembangkan relevansi dan vitalitasnya dalam pendidikan.

Dari dua fokus tersebut, ada batasan bagi suatu lembaga kependidikan agar bisa disebut sebut madrasah. Batas minimal ini untuk menunjukkan kemadrasahan suatu lembaga yaitu dengan persentase tertentu antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Perkembangan madrasah dengan batas minimal ini memungkinkan perkembangan madrasah menjadi sangat terbuka dan fleksibel.

Sedang batas maksimalnya digunakan untuk menggambarkan madrasah dalam pengertian tradisional, yaitu sepenuhnya mengajarkan mata pelajaran agama tanpa memasukkan mata pelajaran umum. Madrasah pada batas maksimal ini bertujuan mempersiapkan ahli-ahli agama. Pengembangan madrasah nya terbatas pada aspek-aspek instrumental seperti metode, sarana dan kurikulum.

Sepanjang sejarahnya, ada tiga pola yang diterapkan dalam madrasah. Pertama, pola madrasah sebagai sekolah Islam. Mata pelajaran madrasah dengan model ini didominasi oleh mata pelajaran umum dengan ditambah mata pelajaran agama. Kedua, pola madrasah sebagai

pendidikan Islam terpadu dengan mata pelajaran agama lebih dominan ditambah dengan mata pelajaran umum. Ketiga, pola madrasah keagamaan dengan mata pelajaran yang sepenuhnya adalah ilmu keagamaan.

B. Latar Belakang Pertumbuhan Madrasah

Banyak yang menganggap bahwa corak madrasah adalah penyesuaian atas tradisi sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Logika ini diambil dari asumsi sebelumnya yang menyatakan pesantren tidak sepenuhnya khas Islam, tetapi merupakan penambahan muatan dan corak keislaman dari tradisi pendidikan yang sudah ada yang bermula dari agama Hindu.

Asumsi ini tidak sepenuhnya benar, sebab kita masih perlu mempertimbangkan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Berikut adalah dua latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia.

1. Faktor Pembaharuan Islam

Dengan menggunakan rentang waktu antara 1900 sampai dengan 1945, Karel A. Steenbrink mengidentifikasi empat faktor yang mendorong gerakan pembaharuan Islam di Indonesia awal abad 20 yaitu:

- a. Faktor keinginan untuk kembali kepada Alquran dan as sunnah.
- b. Faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah
- c. Faktor memperkuat basis sosial, ekonomi, budaya, dan politik
- d. Faktor pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.

Dari sudut pandang ide secara umum gerakan pembaharuan di Indonesia agaknya dipengaruhi pembaharuan di timur tengah pada akhir abad 19, khususnya Jamaluddin al Afghani dan Muhammad Abduh. Pembaharuan ini bertumpu pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang mendorong penggunaan akal sehingga seharusnya ijihad tidak pernah ditutup. Untuk itu, mereka menyerukan penataan sistem kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan termasuk pendidikan agar memungkinkan bagi umat Islam untuk maju.

Pengaruh tokoh pembaharu Timur Tengah terhadap gerakan umat Islam di Indonesia dimungkinkan karena terbukanya kesempatan memperdalam Islam di beberapa pusat pendidikan Islam Arab seperti di Kairo, Makkah, dan Madinah.

2. Respon Terhadap Politik Pendidikan Hindia Belanda

Pada saat yang hampir bersamaan, Belanda mengembangkan sistem pendidikan berbasis sekolah di Indonesia. Karena itu, bisa jadi perkembangan madrasah merupakan responnya sehingga dalam batas tertentu madrasah adalah lembaga pendidikan berbasis sekolah ala Belanda yang diberi muatan keagamaan.

Pada mulanya sekolah-sekolah tersebut eksklusif untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja menurut ukuran pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk HIS (*Hollands Inlandshe School*) dan sekolah kelas dua (*Standard School*). Namun mulai awal abad ke-20 sistem pendidikan tersebut mulai dibuka bagi masyarakat yang lebih luas dalam bentuk sekolah desa atas perintah Gubernur Jendral Van Heutsz. Perubahan tersebut merupakan dampak dari gerakan pencerahan yang sedang gaung di Eropa.

Sekolah desa tidak hanya menawarkan biaya yang murah serta mata pelajaran yang lebih praktis, tetapi juga menjanjikan pekerjaan yang cukup bervariasi walau masih pada level rendahan. Hal ini dan pendirian sekolah di banyak tempat menjadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, masjid dan surau mendapat saingan secara langsung.

Pada tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda mengubah status MULO (*Meer Unigebreid Lager Onderwijs*) dari lembaga kursus menjadi sekolah lanjutan setelah HIS. Sebagai kelanjutan dari MULO disediakan AMS. Pada masa kemerdekaan HIS, MULO, dan AMS menjadi cikal bakal SD (sekolah dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Sejumlah tokoh, khususnya yang telah mengenyam pendidikan Islam tradisional sekaligus pendidikan sekolah ala Belanda mulai menggagas untuk memperbaharui pendidikan Islam yang ada. Cara yang ditempuh adalah mengkombinasikan mata pelajaran keagamaan dengan mata pelajaran umum. Secara konkret, Ahmad Dahlan mendirikan MULO *Met De Qur'an* di Yogya. Usaha yang serupa juga dilakukan oleh berbagai organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dengan coraknya masing-masing.

C. Perkembangan Madrasah

Eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yang dimulai sekitar awal abad ke-20. Madrasah di sini diartikan sebagai suatu model pendidikan Islam yang menggunakan sistem kelas dan mengajarkan sekaligus ilmu-ilmu keagamaan dan non-keagamaan.

1. Lembaga-lembaga pendidikan sebelum madrasah

Sebelum abad kedua puluh, istilah yang digunakan dalam pendidikan Islam adalah pengajian Alquran, masjid, pesantren, surau, langgar dan tajug. Berikut adalah penjelasan ringkasnya.¹

a. Surau

Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum kedatangan Islam. Surau berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat dan tempat tidur anak laki yang sudah balig. Fungsi ini tidak berubah namun bertambah setelah kedatangan Islam. Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman, merupakan yang pertama kali menjadikan surau sebagai tempat mengajarkan Islam terutama tarekat selain menjadikannya tempat shalat.

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halaqah. Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terletak pada kemampuan menghafal teori keilmuan. Sedangkan kelemahannya adalah miskinnya kemampuan memahami dan menganalisis teks.

b. Pesantren

Pesantren mulai tumbuh bersamaan dengan zaman wali songo. Hal ini karena pengembangan Islam di tanah Jawa dimulai dan dibawa oleh wali songo. Pondok pesantren pertama diyakini didirikan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan sunan Gresik. Sebagian kalangan menjelaskan asal kata pesantren dari kata santri dengan awalan pe- dan akhiran -an yang menunjukkan tempat.

Agar sebuah lembaga pendidikan dapat disebut pesantren setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi yaitu kiyai, santri, masjid (tempat belajar), pondok (tempat tinggal santri) dan kitab.

Dari segi metode pembelajaran, pesantren mengenal tiga metode. Pertama, *wetonan* yaitu metode kuliah di mana santri mengelilingi kiai yang menerangkan pelajaran. Di Jawa Barat, sistem ini disebut *bandongan* sedang di Sumatra Barat ini disebut *halaqah*.

Kedua, *sorogan* yaitu metode di mana santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang hendak dipelajari. Dan ketiga, *hafalan* yaitu metode menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya.

¹ Nizar, Samsul (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007 hlm 284-287

2. Madrasah Pada Masa Awal Kemunculannya

a. Beberapa Madrasah di Minangkabau

Madrasah Adabiyah merupakan madrasah yang muncul yang awal di masa pembaharuan pendidikan Islam. Madrasah ini didirikan tahun 1907 delapan tahun setelah pendirinya, Abdullah Ahmad, pulang dari Makkah. Bisa jadi inisiatif pendirian madrasah ini merupakan pengaruh dari pemikiran pembaharuan di Timur Tengah. Secara praktis, ia mulai tergerak mendirikan madrasah setelah mengadakan kontak intensif dengan koleganya Tahir Djamaludin di Singapura.

Madrasah Adabiyah yang didirikan di Padang Panjang sangat berbeda dengan sistem pendidikan di surau. Sekolah ini mengajarkan ilmu-ilmu agama ditambah dengan pelajaran membaca, menulis latin dan ilmu hitung. Belum satu tahun, madrasah Adabiyah ini ditutup karena penentangan masyarakat yang tidak menyukai pola pendidikannya.

Abdullah ahmad memindahkan madrasah tersebut ke kota padang. Di sana, madrasah tersebut mendapat sambutan dari kalangan pedagang. Kurikulum madrasah ini menekankan pada mata pelajaran umum menyerupai HIS. Pelajaran agama dalam madrasah ini hanya diberikan seminggu dua kali, selebihnya pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Pada 1915, madrasah ini mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda.

Tahun 1915, Zainuddin Labai el Yunusiy mendirikan madrasah Diniyah. Madrasah inimengajarkan dasar-dasar berbahasa Arab lalu melatih pembacaan Alquran. Pengetahuan umum yang diajarkan adalah sejarah dan ilmu bumi. Penekanan madrasah ini adalah penguasaan bahasa Arab. Karena itu pada kelas yang lebih tinggi, buku-buku pelajaran pengetahuan umum menggunakan bahasa Arab.

Ada perbedaan yang mencolok antara Madrasah Diniyah Zainuddin Labai dengan Madrasah Adabiyah Abdullah Ahmad. Madrasah Diniyah Zainuddin Labai merupakan bentuk praktis pendidikan yang ditawarkan gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Sedangkan Madrasah Adabiyah Abdullah Ahmad lebih merupakan sekolah Belanda yang ditambahkan dengan materi pendidikan agama. Hal ini yang menyebabkan Madrasah Diniyah Zainuddin Labai lebih mudah diterima kalangan luas.

Tidak mau kalah, muncul juga Madrasah Diniyah Putri di Minangkabau. Madrasah ini didirikan oleh Rahmah Al Yunusiah saudara perempuan Zainuddin Labai. Madrasah in terdiri dari enam kelas denga pola pengajaran dan kurikulum yang sama dengan madrasah Diniyah pada umumnya. Mata pelajaran tambahan yang berbeda adalah keputrian dan pendidikan rumah tangga.

Pada masa itu, yang terakhir muncul adalah Surau-Surau Sumatra Tawalib. Abdul Karim Amrullah memasukkan tradisi kelas atau sistem madrasah kedalam surau di wilayah Minangkabau. Surau yang dipimpinnya berubah jadi sistem madrasah pada tahun 1911. Pembaharuan di sini bersifat instrumental yaitu perubahan di dalam proses pendidikan. Dari segi materi pembelajaran, madrasah ini tetap mengkhususkan diri pada pendidikan keagamaan.

b. Beberapa Madrasah di Pulau Jawa

Perbedaan perkembangan madrasah di Jawa dan di Minangkabau adalah perkembangan madrasah di Pulau Jawa didukung perkumpulan keagamaan yang lebih massif seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam dan yang lainnya. Walaupun tentu saja, madrasah-madrasah itu dipelopori oleh tokoh-tokoh pembaharu seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari.

Setidaknya ada dua faktor Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Islam dengan pendekatan yang modern. Pertama, Ahmad Dahlan memiliki pengalaman belajar secara tradisional di pesantren dan juga di Makkah yang tentunya dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Timur Tengah. Kedua, Ahmad Dahlan merasa banyak pengamalan keislaman di masyarakat yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Alquran dan as sunnah.

Pada awal abad 20, Ahmad Dahlan telah mendirikan madrasah dengan bahasa Arab sebagai pengantar pengajarannya. Hanya saja madrasah tersebut tidak lama tutup. Kemudian pada 1 Desember 1911, Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dasar di lingkungan keraton Yogyakarta dan memberikan pengaruh keagamaan yang cukup kuat. Sistem pengajarannya mengikuti sistem sekolah Belanda, sehingga sekolah tersebut mendapat bantuan subsidi dari pemerintah kolonial Belanda.

Usaha pengembangan pendidikan Islam ini semakin digalakkan setelah ia mendirikan perkumpulan Muhammadiyah pada 18 Nopember 1912. Dalam mengembangkan pendidikan Islam, Muhammadiyah menggunakan dua sistem. Pertama, sekolah yang mengikuti pola sekolah ala Belanda yang ditambah pelajaran agama. Kedua, madrasah yang lebih banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama.

Sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah ketika masa penjajahan di antaranya adalah Kweekschool Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Madrasah Tsanawiyah/Wustha Muhammadiyah, Mu'allimin Muhammadiyah, Mu'allimat Muhammadiyah, HIS Muhammadiyah, MULO Muhammadiyah, dan AMS Muhammadiyah.

Tokoh lainnya yang terkenal adalah KH Hasyim Asy'ari. Beliau adalah orang yang memperkenalkan sistem madrasah di pesantren Tebu Ireng Jombang. Pesantren Tebu Ireng Jombang berdiri pada 1899 dengan 28 orang santri. Awalnya pesantren ini menitik beratkan pendidikan kepada ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab.

Pada 1919, Hasyim Asy'ari melakukan pembaharuan di pesantren Tebu Ireng. Pengajaran yang semula dilaksanakan hanya dengan sistem sorogan dan bandungan kemudian ditambah dengan sistem madrasah. Dengan kata lain, madrasah menjadi subsistem dalam sistem pendidikan di pesantren Tebu Ireng.

Madrasah tersebut terkenal dengan nama Madrasah Salafiyah. Setelah enam tahun dikelola Hasyim Asy'ari, madrasah tersebut diserahkan kepada KH Ilyas. Di tangan Ilyas, Madrasah Salafiyah yang sebelumnya hanya mengajarkan ilmu agama menjadi mengajarkan ilmu-ilmu umum yang ditulis dengan bahasa latin. Ilmu umum yang dimasukkan ke dalam kurikulum saat itu adalah menulis bahasa latin, bahasa Indonesia, ilmu bumi, sejarah Indonesia dan ilmu hitung.

3. Madrasah Pada Masa Penjajahan Belanda

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, latar belakang lahirnya madrasah bertumpu pada dua faktor penting. Pertama, laju perkembangan sekolah-sekolah Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas membawa watak sekularisme. Kedua, pendidikan tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan praktis yang memadai. Karena itu, pertumbuhan madrasah tidak sekarang defensif terhadap politik pendidikan Belanda, tetapi juga progresif dengan model dan organisasi yang teratur dan terencana.

Politik pendidikan Belanda sendiri pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Perlawanan rakyat di Cilegon pada 1888 merupakan pelajaran bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menerbitkan ordonansi tersebut. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama memiliki surat izin dari pemerintah. Akibatnya, tidak setiap orang meskipun ahli ilmu agama bisa mengajar di lembaga-lembaga pendidikan resmi.

Umat Islam bereaksi cukup keras terhadap ordonansi tersebut. Di Minangkabau, sebuah pertemuan khusus diselenggarakan untuk membahas masalah ini. Keputusan pertemuan tersebut adalah menentangnya. Sekolah-sekolah muhammadiyah yang awalnya menerima

ordonansi tersebut sehingga mendapat subsidi dari pemerintah Belanda kemudian memutuskan untuk menolaknya.

Ada dua corak reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Pertama, menghindari pengaruh politik hindia belandan terhadap sistem pendidikan Islam. Selain mengambil lokasi di daerah-daerah terpencil, kurikulum yang dikembangkan hampir seluruhnya berorientasi pada pembinaan mental keagamaan. Hanya saja resikonya, lembaga pendidikan tersebut terasing dari perkembangan masyarakat.

Kedua, corak lainnya adalah dengan usaha menapai kesetaraan dan kesejajaran baik dari segi kelembagaan maupun dari segi kurikulum. Mereka memandang tekanan pemerintah Hindia Belanda ini merupakan kebijakan diskriminatif. Bagi mereka, corak pertama malah memberikan ruang bagi pendidikan dari pemerintah Hindia Belanda. Karena itu, mereka secara mandiri mengembangkan lembaga pendidikan dengan produk yang sama dengan sekolah ala Belanda, namun tidak tercerabut akar keagamaannya.

4. Madrasah Pada Masa Penjajahan Jepang

Kondisi yang kurang menguntungkan masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, walaupun di sisi lain Jepang lebih memberikan kebebasan dibanding Belanda. Hal ini karena kebijakan pendidikan pemerintah penjajah Jepang lebih berorientasi pada penguatan kekuasaannya di Indonesia. Bahkan untuk menggaet dukungan umat Islam, Jepang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah.

Meski demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadaai madrasah sebagai potensi perlawanan yang membahayakan pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk mengamankan kepentingannya pemerintah Jepang lebih banyak mengangkat kalangan priyayi pada untuk jabatan di Kantor Urusan Agama. Hal tersebut karena Jepang mengerti para priyayi tersebut tidak memiliki perhatian serius pada pendidikan Islam di Indonesia.

Respon umat Islam terhadap kebijakan pendidikan pemerintahan Jepang nampaknya lebih progresif. M. Jamil Jambek dan Mahmud Yunus memimpin para ulama Minangkabau mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau. Majelis ini bertujuan mengkoordinasikan pendidikan agama, baik di madrasah maupun di sekolah.

5. Madrasah Pada Masa Orde Lama

Perkembangan madrasah pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang berdiri pada 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang dulu secara intensif memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam pendidikan.

Salah satu gambaran perkembangan madrasah yang cukup menonjol pada masa Orde Lama adalah berdiri dan berkembangnya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Ini memang merupakan perwujudan tugas bidang pendidikan di Departemen Agama. Tugas lainnya yaitu memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular serta memberikan pengajaran umum di madrasah.

Dari segi keberadaannya, tidak ada masalah yang prinsipil. Masalah muncul pada segi yang menyangkut ruang lingkup sejauh mana pendidikan Islam dikembangkan. Apakah terbatas pada pendidikan Islam dalam pengertian ilmu agama saja atau pendidikan Islam yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan berdasarkan agama. Kalangan Islam berpendirian bahwa pendidikan Islam harus dikembangkan sejauh mungkin. Sementara kalangan non-muslim membatasinya dalam lingkup pengajaran agama.

Keentuan yang lebih tegas tentang pendidikan agama dirumuskan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP). Dari sepuluh poin rekomendasi tersebut, intinya tampak bahwa ruang lingkup pendidikan Islam sangat terbatas pada pengajaran agama di sekolah. Pengajaran agama dialokasikan hanya satu kali seminggu dan pengajaran bahasa Arab dihilangkan.

6. Madrasah Pada Masa Orde Baru

Secara umum perkembangan madrasah pada masa 80an dan 90an dirasa cukup positif dan konstruktif. Pemerintah Orde Baru memandang lembaga madrasah harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru kebijakan madrasah masih merupakan kelanjutan dari kebijakan Orde Lama. Namun pada akhir 70an, pemerintahan Orde Baru mulai memikirkan kemungkinan integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Pada undang undang sebelumnya, khususnya Pasal 2 Undang-undang pendidikan tahun 1950 No. 4 jo. No. 12 tahun 1954 menegaskan bahwa madrasah bukanlah sekolah formal. Pada 1975, keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri antara menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama dan menteri dalam negeri yang mengatur madrasah. Skb ini memutuskan kurikulum menjadi 70% umum dan 30% agama.²

Pada undang-undang yang baru yaitu undang-undang no 2 tahun 1989 telah memasukkan madrasah pada kategori pendidikan sekolah, setelah sebelumnya hanya

² Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007 hlm. 4

dianggap sebagai pendidikan nonformal saja, tanpa harus meninggalkan karakter keagamaannya. Posisi ini ditegaskan lagi dengan undang-undang Sisdiknas pada tahun 2003.³

Pertumbuhan madrasah di Indonesia, selain merupakan pengaruh dair gerakan pembaharuan di Timur Tengah, juga merupakan respon terhadap politik Belanda yang diskriminatif dan sekuler. Kemudian sepanjang sejarah ditemukan dua corak perkembangan madrasah. Corak Sumatra Barat dengan madrasah yang merupakan hasil perkembangan dari surau dan corak Pulau Jawa dengan perkembangan madrasah yang terpisah dari pesantren.

Madrasah pada masa penjajahan berkembang tergantung kebijakan penjajah saat itu. Pada masa penjajahan Belanda, madrasah sulit berkembang karena Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru. Pada masa Jepang madrasah mulai berkembang karena Jepang berharap dukungan dari rakyat Indonesia. Sedang pada masa sekarang, madrasah sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, walaupun posisi madrasah masih kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Haidar Putra Daulay, 2007, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Nizar, Samsul (ed.), 2007, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* Jakarta: Kencana.

³ *Ibid* hlm. 6